

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentangan kekayaan potensi alam Indonesia memberikan nilai tambah tersendiri bagi negara. Dengan melimpahnya sumber daya alam, keberagaman biodiversitas, kekayaan tradisi dan budaya akan mendatangkan keuntungan besar bagi bangsa Indonesia. Tentunya jika beragam potensi tersebut mampu dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan maka sudah tentu jika potensi alam Indonesia akan menjadi sumber yang menguntungkan bagi keseluruhan kehidupan di Indonesia. Salah satu pemanfaatan potensi tersebut adalah pariwisata. Pariwisata merupakan segala bentuk kegiatan perjalanan ke suatu tempat yang dilakukan dalam rangka rekreasi. Pariwisata menurut Hollway (dalam Budiani, dkk., 2018:171) merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kenikmatan baik di dalam perjalanan maupun di tempat tujuan, sedangkan wisata, yaitu pendayagunaan sumber daya alam yang mengedepankan jasa alam untuk memperoleh kepuasan bagi jasmani maupun rohani manusia. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap sumber devisa dan pembangunan negara. Untuk mendukung keberlanjutan sektor pariwisata diperlukan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan agar sektor pariwisata tersebut dapat tetap bersesuaian dengan keadaan di masa mendatang.

Sektor pariwisata ini memiliki manfaat yang besar bagi negara. Manfaat langsung yang didapat negara dari sektor pariwisata adalah pertumbuhan ekonomi yang berasal dari peningkatan pendapatan devisa negara dan peningkatan

produktivitas negara dengan berkurangnya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Secara lebih lanjut, manfaat dari pengembangan sektor pariwisata ini dapat mendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian nasional. Perkembangan sektor perekonomian tersebut dapat menunjang peningkatan ekonomi yang berasal dari pembangunan infrastruktur, pemajuan beberapa industri baru, peningkatan hasil peternakan dan peternakan, meningkatkan *branding* produk lokal kepada dunia internasional, sekaligus akan menunjang permintaan produk hasil karya lokal, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan pendapatan devisa negara dan pendapatan nasional (Hanif, 2013).

Sektor pariwisata saat ini telah bertumbuh pada ke arah industri yang mendatangkan keuntungan dan mempunyai peluang yang besar bagi sebuah pembangunan di masa mendatang. Hal tersebut telah dirasakan oleh pemerintah bahwa sektor pariwisata telah menjadi peluang bisnis yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan devisa negara, menambah peluang lapangan kerja baru, membuka kesempatan bagi wirausaha, meningkatkan rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan yang bermuara pada tumbuhnya rasa cinta tanah air terhadap kearifan lokal budaya setempat. Di Indonesia, kunjungan pariwisata terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut menjadi suatu bukti bahwa sektor pariwisata adalah salah satu sektor unggulan di Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Indonesia pada tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Wisatawan Domestik	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Total
2016	264.337.518	11.519.275	275.856.793
2017	270.822.003	14.039.799	284.861.802
2018	303.403.888	15.747.305	319.151.193
2019	722.158.733	16.015.954	738.174.687
2020	518.890.000	4.020.000	522.910.000

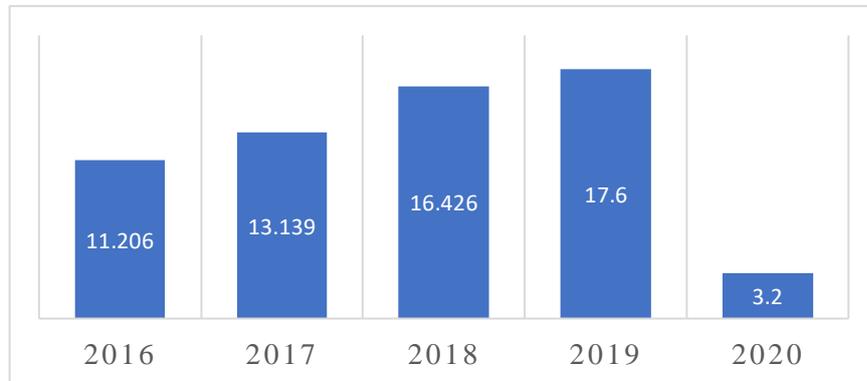
Sumber: diolah peneliti dari beberapa sumber

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan wisata ke Indonesia yang terdiri atas wisatawan dalam negeri ataupun wisatawan asing mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan di Indonesia mencapai 266.649.781 wisatawan, yang mana mengalami peningkatan sebesar 3,45% pada tahun 2019 menjadi 275.856.793 wisatawan. Pada tahun 2017 kembali mengalami peningkatan jumlah wisatawan sebesar 3,26% menjadi 284.861.802 wisatawan. Peningkatan kembali juga terjadi pada tahun 2018 hingga mencapai 319.151.193 wisatawan atau mengalami peningkatan sebesar 10,74%, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 56,77% sehingga jumlah wisatawan tahun 2019 sebanyak 738.174.687 wisatawan. Jumlah wisatawan mengalami penurunan yang cukup drastic pada tahun 2020. Hal tersebut merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial kegiatan masyarakat termasuk melakukan kegiatan pariwisata untuk memutus penyebaran Covid-19 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Bagi sektor pariwisata, tentunya hal tersebut memberikan dampak yang cukup luas. Dikutip dari

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jika Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel dengan klasifikasi bintang di Indonesia memiliki rerata 40,79 % pada Bulan Desember 2020 atau mengalami penurunan sebanyak 18,60% jika dipadankan dengan TPK pada bulan bulan yang sama di tahun 2019 dengan rata-rata 59,39% (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020). Meskipun jumlah wisatawan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020, sektor pariwisata di Indonesia tidak mati meskipun menghadapi tantangan besar Pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi satu bukti jika sektor pariwisata di Indonesia masih mempunyai kelayakan dan kekuatan untuk dilakukan pengembangan.

Berkembangnya sektor pariwisata yang dipengaruhi oleh banyaknya kunjungan wisatawan pada destinasi pariwisata di Indonesia membawa dampak yang positif terhadap perekonomian negara. Melalui pengembangan sektor pariwisata di suatu negara akan berpengaruh terhadap kemajuan bagi sektor lain untuk ikut berkembang. Perkembangan sektor pariwisata dapat menunjang industri di bidang pariwisata, seperti sektor kesenian dan kebudayaan, pertanian, hasil ternak, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja. Hal ini lah yang membuktikan bahwa dengan berkembangnya pariwisata, akan memunculkan inovasi baru terkait industri pariwisata yang mampu menghasilkan devisa negara dan menjadi sarana pembukaan lapangan kerja baru sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara. Hal tersebut terbukti bahwa pada kontribusi sektor pariwisata utamanya yang berasal dari wisatawan mancanegara terhadap penerimaan negara berupa devisa sektor pariwisata mengalami peningkatan.

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Devisa dari Sektor Pariwisata di Indonesia tahun 2016-2020 (dalam Miliar US \$)



Sumber: dikelola oleh penulis dari beberapa sumber, 2022

Dari grafik 1.1 tersebut menunjukkan jika perolehan devisa negara dari sektor pariwisata mengalami peningkatan di dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 devisa dari sektor pariwisata yang didapatkan Indonesia sebanyak \$11,206 Miliar. Jumlah tersebut di tahun 2017 meningkat sebesar 17,25% menjadi \$13,139 Miliar. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2018 hingga mencapai \$16,426 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar 25,02%. Tahun 2019 terjadi sedikit peningkatan sebesar 7,15% menjadi \$17,6 Miliar. Pendapatan devisa negara dari sektor pariwisata mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020 menjadi \$3,2 Miliar atau mengalami penurunan sebesar 81,8% dibandingkan tahun 2019. Penurunan drastis tersebut merupakan dampak Pandemi Covid-19 sehingga diberlakukan pembatasan penerbangan internasional yang berlaku di Indonesia dan beberapa negara di dunia yang mengakibatkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara. Meskipun mengalami penurunan, pariwisata masih memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan hal tersebut mengindikasikan jika lingkup pariwisata memiliki potensi yang stabil untuk dilakukan pengembangan meskipun dihadapkan dengan keadaan pandemi.

Tabel 1.2 Lima Daerah dengan Kunjungan Wisatawan Nusantara Tertinggi di Indonesia Tahun 2018-2020

Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Provinsi	Jumlah Wisatawan	Provinsi	Jumlah Wisatawan	Provinsi	Jumlah Wisatawan
Jawa Timur	53.244.287	Jawa Barat	107.451.428	Jawa Timur	125.343.705
Jawa Barat	53.203.387	Jawa Timur	99.579.825	Jawa Tengah	118.122.553
Jawa Tengah	43.110.589	Sumatera Utara	63.576.590	Jawa Barat	90.182.229
DKI Jakarta	24.967.080	Jawa Tengah	59.838.282	DKI Jakarta	43.920.059
Banten	13.275.125	DKI Jakarta	57.494.172	Banten	30.090.681

Sumber: BPS Republik Indonesia, 2020

Dari tabel 1.2 menunjukkan salah satu daerah dengan jumlah perjalanan wisatawan tertinggi di Indonesia, yaitu Jawa Tengah. Pada tiga tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan bahwa jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Jawa Tengah selalu masuk ke dalam 5 besar provinsi dengan jumlah perjalanan wisatawan nusantara terbanyak di Indonesia (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020). Tingginya jumlah wisatawan yang melakukan kunjungan di wilayah Jawa Tengah, akan membawa dampak pada perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari pariwisata.

Tabel 1.3 Jumlah Wisatawan dan Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2020

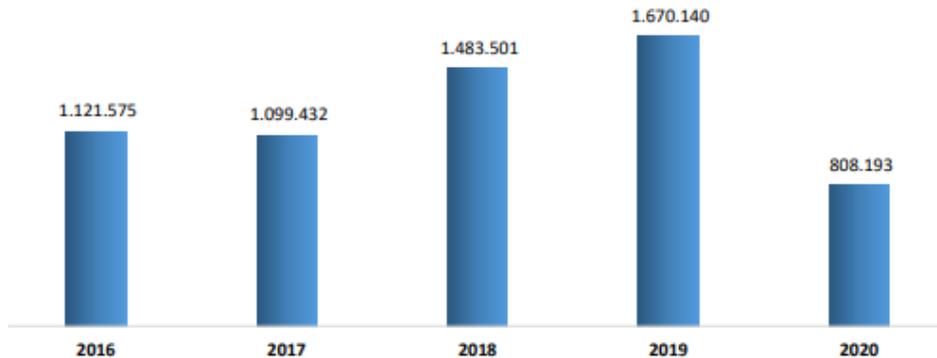
Tahun	Jumlah Wisatawan		Pendapatan Daerah
	Nusantara	Mancanegara	
2017	57.900.863	691.699	Rp. 212.570.844.806
2018	48.943.607	677.168	Rp. 301.622.707.421
2019	40.118.470	781.107	Rp. 314.725.465.729
2020	8.776.257	53.399	Rp. 52.518.077.330

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Dinas Kepemudaan, 2020)

Tabel 1.3 menunjukkan jika perolehan pendapatan dana daerah yang bersumber dari sektor pariwisata mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 pendapatan daerah dari pariwisata di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 212.570.844.806, yang mana jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 41,89% menjadi Rp. 301.622.707.421. Pendapatan daerah tersebut pada tahun 2019 juga mengalami peningkatan hingga jumlah pendapatannya mencapai Rp. 314.725.465.729, yang menunjukkan kenaikan sebesar 4,34%. Pada tahun 2020 pendapatan dana daerah dengan sumber sektor pariwisata di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang drastis disebabkan adanya penurunan yang jauh jumlah wisatawan baik lokal maupun domestik imbas dari Pandemi Covid-19. Meskipun mengalami penurunan pendapatan yang substansial, sektor pariwisata di Jawa Tengah tetap memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu dari 35 Kabupaten / Kota yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo memiliki berbagai kekayaan alam yang laten untuk dilakukan pengembangan untuk berbagai sektor, termasuk pariwisata. Sektor Pariwisata yang berada di Kabupaten Wonosobo terdiri atas beberapa jenis pariwisata, seperti wisata alam, budaya, minat khusus, agrowisata, wisata buatan, dan desa wisata. Sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo terus mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kunjungan pariwisatanya.

Gambar 1.2 Jumlah Kunjungan Pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2020



Sumber: (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2022b)

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan jika jumlah kunjungan pariwisata terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah kunjungan pariwisata mengalami penurunan yang cukup substansial yang mencapai 48,4% dibanding tahun 2019. Jumlah kunjungan pariwisata Kabupaten Wonosobo tahun 2020 sebanyak 808.193 pengunjung, dengan komposisi wisatawan dalam negeri sebanyak 808.067 orang dan sebanyak 126 orang merupakan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Penurunan jumlah kunjungan pariwisata di Kabupaten Wonosobo disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang memunculkan pemberlakuan pembatasan sosial terhadap kegiatan masyarakat serta adanya larangan kunjungan wisatawan asing yang memasuki wilayah Indonesia untuk sementara waktu. Imbasnya pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 tercatat tidak ada kunjungan pariwisata ke Kabupaten Wonosobo.

Jumlah kunjungan pariwisata akan mempengaruhi jumlah perolehan pendapatan daerah yang bersumber dari pariwisata di Kabupaten Wonosobo. Pendapatan yang bersumber dari pariwisata di Kabupaten Wonosobo terdiri atas

pendapatan pajak atas dijalankannya usaha hiburan, hotel, tempat makan, iklan/reklame.

Tabel 1.4 Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo dari Sektor Pariwisata tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pendapatan
2016	Rp. 3.724.970.100
2017	Rp. 3.282.274.000
2018	Rp. 5.084.267.300
2019	Rp. 6.171.685.500
2020	Rp. 2.710.855.200

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2021

Berdasarkan tabel 1.4, total pendapatan sektor pariwisata pada tahun 2016 hingga tahun 2019 secara umum mengalami peningkatan, kecuali untuk tahun 2020 yang mengalami pengurangan yang cukup signifikan dibandingkan pendapatan pada tahun 2019. Pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo mengalami penurunan sebesar 43% dibandingkan tahun 2019. Penurunan kunjungan pariwisata akibat terpaan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pendapatan yang bersumber dari pariwisata pada tahun 2020 sejumlah Rp2.710.855.200,00 merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan tiket wisata, kios dan tempat parkir di wilayah pariwisata.

Pendapatan daerah dari yang berasal dari pariwisata di Kabupaten Wonosobo belum berkontribusi secara maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wonosobo. Terhitung hingga tahun 2020, perolehan pendapatan yang berasal dari pariwisata baru dapat dihitung melalui pendapatan yang bersumber dari retribusi tempat wisata di bawah kewenangan pemerintah daerah dan pendapatan pajak dari hotel dan restoran. Pajak pendapatan lain yang bersumber dari usaha-usaha pariwisata dan sektor pendukungnya belum teridentifikasi dengan

baik (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2022b).

Tabel 1.5 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2020

Tahun	PAD	Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	Persentase Kontribusi
2016	Rp. 179.894.767.510	Rp. 4.191.584.083	2,33%
2017	Rp. 228.017.473.938	Rp. 3.807.891.815	1,64%
2018	Rp. 226.819.478.601	Rp. 5.443.667.486	2,4%
2019	Rp. 238.371.743.591	Rp. 762.789.579	0,32%
2020	Rp. 251.724.091.045	Rp. 2.718.620.183	1,08%

Sumber: (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2022b)

Tabel 1.5 menunjukkan jika sumbangan pendapatan yang berasal dari pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Wonosobo tertahun 2016-2020 masih sangat rendah dan persentasenya mengalami fluktuasi. Hal tersebut diakibatkan karena PAD yang masuk dari sektor pariwisata hanya dari pariwisata yang pengelolaannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Pariwisata yang pengelolaannya bukan dari pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo hanya akan berkontribusi melalui pajak hotel, restoran, maupun *homestay*.

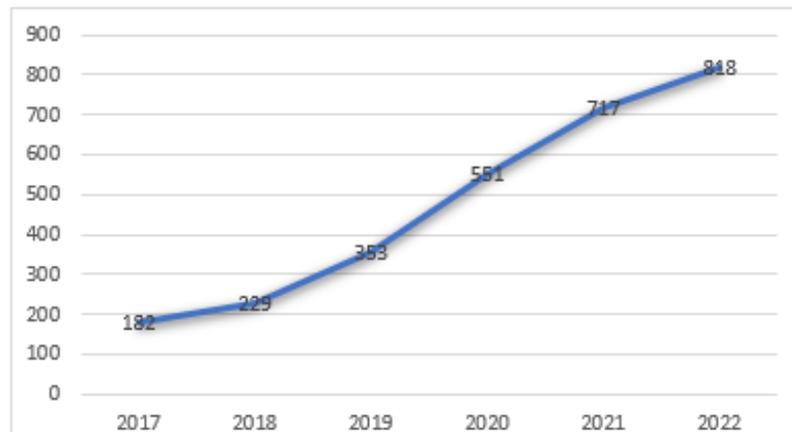
Daya tarik pengunjung pariwisata baru-baru ini banyak beralih pada pariwisata yang berada di wilayah pedesaan, karena wilayah pedesaan memberikan suasana alami, menenangkan dan tenteram (Yudana, dkk. 2019:16). Desa wisata dapat didefinisikan sebagai penyatuan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitasi pendukung yang ditampilkan dengan konsep penyatuan dengan kehidupan alami masyarakat baik dalam hal tradisi dan budaya otentik wilayah desa tersebut (Desa yang menjadi tempat orang berwisata). Sementara itu, menurut Sudibya (2018: 22-23) menyatakan pengertian desa wisata, yaitu suatu bagian wilayah desa dimana di dalamnya terdapat pesona dan keunikan berupa kondisi lingkungan alam yang ada di desa ataupun kehidupan masyarakatan yang ada di desa, melalui pengemasan dan

pengelolaan yang natural dan apik disertai pemenuhan bentuk fasilitas dukung pariwisata demi membentuk penataan daerah pedesaan secara terpadu dan terencana. Melalui pengaturan dan pengemasan yang khas tersebut maka akan mampu menumbuhkan daya tarik wisatawan ke pedesaan sehingga akan berdampak pada pertumbuhan aktifitas perekonomian dari sektor pariwisata, membangun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat, dan meningkatkan kesejahteraan wilayah dan masyarakat tersebut.

Desa wisata termasuk satu jenis wisata daerah yang menjadi andalan dan paling populer untuk dilakukan pengembangan dalam waktu terakhir ini (Hermawan, 2016). Desa Wisata sesuai yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) termasuk dalam program pengembangan pariwisata berkelanjutan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi nasional (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021). Wilayah pedesaan yang mempunyai ciri khas unik seperti keadaan alamnya masih natural, panorama alam yang elok, flora dan fauna yang beragam, penduduk desa dan kebudayaan masyarakat memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan. Oleh karena itu, setiap tahunnya Indonesia mengalami penambahan jumlah desa wisata. Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa jumlah Desa Wisata di Indonesia untuk tahun 2014 jumlahnya baru mencapai 1.302 desa. Jumlah tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 1.734 desa wisata dan jumlah desa wisata kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga menjadi 1.831 desa wisata

dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia yang sebanyak 83.820 desa. Kenaikan desa wisata berdasarkan kuantitasnya juga terjadi di Jawa Tengah yang pada lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan.

Gambar 1.3 Grafik Peningkatan Jumlah Desa Wisata di Jawa Tengah



Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar 1.3 mengungkapkan jika kuantitas desa wisata di Jawa Tengah terus memperoleh kenaikan, yang mana untuk tahun 2022 tercatat kuantitas desa wisata mencapai 848 desa wisata dari 8.562 Desa/Kelurahan di Jawa Tengah. Dari total desa wisata yang berada di Provinsi Jawa Tengah tersebut, menurut perolehan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, terdapat 33 desa wisata berada di Kabupaten Wonosobo. Jumlah desa wisata di Kabupaten Wonosobo juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 57 desa wisata.

Desa Wisata Sembungan menjadi salah satu dari 57 desa wisata yang berada di wilayah Kabupaten Wonosobo. Desa Wisata Sembungan berada Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, yang secara geografis letaknya berada di $-7^{\circ}13'31''$ dan $-7^{\circ}15'19''$ LS (Lintang selatan) dan terletak pada $109^{\circ}54'11''$ dan $109^{\circ}55'47''$ BT (Bujur Timur)(Budiani et al., 2018). Desa Sembungan menjadi termasuk desa

wisata yang mempunyai banyak atraksi pariwisata yang memiliki kelayakan untuk dilakukan pengembangan. Desa Sembungan banyak dikenal sebagai desa yang paling tinggi di Pulau Jawa karena Desa Sembungan terletak pada ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut (Prakoso, 2019). Ketinggian Desa Wisata Sembungan lebih tinggi dibandingkan Desa lain di Pulau Jawa, seperti Desa Argosari yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang ketinggian wilayahnya 2.000 meter di atas permukaan laut (detikEdu, 2021). Desa Wisata Sembungan juga berhasil menjadi salah satu desa wisata yang masuk dalam 50 desa wisata terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) pada tahun 2022 yang diprakarsai oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, 2022a). Penilaian ADWI tersebut didasarkan pada daya tarik pengunjung, *homestay*, digital dan kreatif, *souvenir*, toilet umum, penerapan fasilitas CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*), beserta kelembagaan desa.

Desa Sembungan mempunyai berbagai potensi pariwisata yang terdiri atas pariwisata alami maupun pariwisata kebudayaan. Daya Tarik pariwisata yang ada di Desa Sembungan terdiri dari wisata alam berupa Telaga Cebong, Bukit Sikunir, Bukit Pakuwaja, dan Curug Sikarim. Selain wisata alam, Desa Sembungan memiliki beberapa potensi wisata dalam bentuk wisata budaya yang dapat meliputi Upacara Ruwatan Rambut Gimbang, seni bela diri khas Desa Sembungan yaitu Rudad, dan terdapat wisata budaya lain, yaitu Ruwat Nyandranan Resik Telaga Cebong. Selain atraksi pariwisata tersebut, di Desa Sembungan juga terdapat pariwisata lain seperti pariwisata pertanian (Agrowisata) seperti Kebun Kentang,

Purwaceng, Carica, Cabai Dieng, dan Terong Kemar yang menjadi produk hasil pertanian andalan Desa Wisata Sembungan.

Kawasan Desa Sembungan juga menjadi wilayah di Kabupaten Wonosobo yang memiliki potensi warisan geologi yang dapat dikembangkan menjadi geowisata. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Sembungan termasuk dalam objek keragaman geologi yang ada di Kabupaten Wonosobo, yaitu Telaga Cebong, Bukit Sikunir, Bukit Seroja dan Gunung Pakuwaja. Daya tarik wisata tersebut masing-masing tersusun atas komponen geologi seperti breksi vulkanik, lava andesit biotit, lava andesit-dasit, dan endapan piroklastik.

Mengacu pada data Kementerian Desa Republik Indonesia, pada tahun 2022 Desa Sembungan yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan status desa maju (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2022). Indeks Desa Membangun (IDM) adalah suatu indeks yang ditentukan dengan berlandaskan pada tiga ketahanan, yakni indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi / lingkungan. Ketiga indeks tersebut menjadi kekuatan bagi suatu desa untuk melihat tingkat kemampuan desa dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan desa. Pembekalan kegiatan pengembangan dan langkah dalam memberdayakan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang berkelanjutan sehingga menghasilkan pemerataan pengembangan desa yang didasarkan atas penguatan nilai kearifan lokal serta melakukan pengembangan potensi kekayaan

alam berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2019).

Tabel 1.6 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Seluruh Desa Di Kecamatan Kejajar Tahun 2022

No.	Desa	Status IDM	Ranking IDM Nasional
1.	Desa Buntu	Maju	3342
2.	Desa Tambi	Maju	3554
3.	Desa Patakbanteng	Maju	4469
4.	Desa Sembungan	Maju	5083
5.	Desa Jojogan	Maju	6322
6.	Desa Dieng	Maju	6917
7.	Desa Sigedang	Maju	7112
8.	Desa Sikunang	Maju	7212
9.	Desa Parikesit	Maju	7434
10.	Desa Igrimranak	Berkembang	11842
11.	Desa Serang	Berkembang	13353
12.	Desa Tieng	Berkembang	13360
13.	Desa Campursari	Berkembang	14889
14.	Desa Surengede	Berkembang	16285
15.	Desa Kreo	Berkembang	16758

Sumber: diolah peneliti (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2022)

Dari tabel 1.6 menunjukkan bahwa Desa Sembungan merupakan salah satu desa yang maju yang ada di Kecamatan Kejajar yang menduduki peringkat empat teratas sebagai desa maju berdasarkan Indeks Desa Membangun. Kemajuan Desa Sembungan tersebut tentunya didorong melalui pengembangan potensi sumber daya alam desa yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan desa. Berbagai potensi yang ada di Desa Sembungan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan PADes Sembungan mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menjadi Rp. 40.000.000. PADes Sembungan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga menjadi Rp. 151.000.000. Pada tahun 2021, PADes Sembungan kembali mengalami penurunan yang hanya mendapatkan

PADes sebesar Rp. 50.000.000. (Open Data Desa Kabupaten Wonosobo, 2021). PADes dapat menjadi tolok ukur kemandirian suatu desa dalam melakukan pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut (Mulyani, 2020:30). Potensi desa yang dimaksud juga termasuk potensi pariwisata yang dikelola oleh Desa Sembungan. Dari data PADes tersebut menunjukkan jika PADes Sembungan mengalami fluktuasi tiap tahunnya sehingga diperlukan pengelolaan potensi Desa Sembungan secara lebih maksimal agar potensi Desa Sembungan, khususnya yang asal sumbernya adalah sektor kepariwisataan dapat menyumbang andil yang lebih besar terhadap desa, pembangunan desa, dan kesejahteraan masyarakat Desa Sembungan.

Dengan banyaknya potensi pariwisata di Desa Sembungan tersebut, ternyata masih terdapat kendala, yaitu masih kurang memadainya akses transportasi menuju Desa Sembungan dengan keadaan jalan yang mengarah ke Desa Wisata Sembungan sering macet disebabkan adanya kendaraan yang berasal dari wisatawan yang jumlahnya banyak dan seringkali kendaraan yang dibawa memiliki permasalahan sehingga tidak dapat melewati medan jalan menuju Desa Wisata Sembungan. Hal tersebut biasanya akan terjadi pada akhir pekan maupun pada waktu hari libur panjang seperti hari besar keagamaan, libur tahun baru, maupun libur sekolah. Kemacetan yang terjadi di Desa Sembungan tidak hanya terjadi di jalan utama saja, namun juga berimbas pada akses jalan pendakian menuju puncak Bukit Sikunir. Hal tersebut menimbulkan banyaknya keluhan dari para wisatawan yang hendak menuju Bukit Sikunir karena jalan masuk dan keluar bukit selalu penuh terutama terjadi pada waktu-waktu umum keberangkatan maupun turun dari pendakian yang

terjadi antara pukul 03.00-06.00 WIB yang mana pada waktu-waktu tersebut wisatawan banyak berkunjung ke Bukit Sikunir untuk menikmati keindahan terbitnya matahari. Dengan banyaknya pengunjung yang mendatangi Bukit Sikunir pada waktu-waktu tersebut mengharuskan para wisatawan untuk jalan kaki menuju Bukit Sikunir dalam keadaan padat pengunjung (Noveriano, 2020:2). Keadaan akses menuju kawasan pariwisata tersebut dapat menjadi bukti jika masih belum terlaksananya peran yang maksimal yang diambil oleh *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pengembangan desa wisata dalam hal penyediaan sarana jalan yang memadai dan berkaitan dengan pengaturan kepadatan kunjungan wisatawan di Desa Wisata Sembungan.

Permasalahan selanjutnya dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Budiani yang membahas mengenai pengenalan potensi dan penentuan strategi yang dapat dilakukan oleh Desa Wisata Sembungan dalam melaksanakan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang didasarkan atas peranan komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah menyebutkan bahwa masih belum maksimalnya koordinasi berbagai *stakeholder* pariwisata di Desa Wisata Sembungan yaitu antara pengelola pariwisata dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo yang berakibat pada kurang optimalnya pengelolaan potensi dan pembangunan pariwisata berkelanjutan pada Desa Wisata Sembungan baik dari sumber daya manusia, atraksi wisata, sarana dan prasana pendukung wisata (Budiani, dkk. 2018:174). Koordinasi antar *stakeholder* menjadi penting karena para *stakeholder* ini yang nantinya akan mengambil peranan dalam pengembangan

potensi Desa Wisata Sembungan. Sinergitas dan kemitraan antar *stakeholder* baik dalam perencanaan maupun pengembangan potensi Desa Wisata Sembungan juga belum optimal, yang salah satunya dibuktikan dengan kebermanfaatan langsung adanya sektor pariwisata masih terbatas pada masyarakat pengelola pariwisata (Budiani, dkk. 2018:176). Hal tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan pengoptimalan peran-peran tiap *stakeholder* yang memiliki keterlibatan dalam melakukan pengembangan Desa Sembungan.

Pengelolaan desa wisata membutuhkan peranan dari berbagai *stakeholder* yang akan melaksanakan fungsinya dalam mengatasi permasalahan pengembangan potensi Desa Wisata Sembungan. Dalam mengoptimalkan peranan tiap *stakeholder* yang terlibat pada pelaksanaan pengembangan potensi Desa Wisata Sembungan maka perlu dilakukan pengidentifikasian peran-peran *stakeholder* yang terlibat (Hekmatyar, dkk. 2015:124). Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pariwisata membutuhkan peran aktif *stakeholder* (Talib, 202:13). Pengembangan pariwisata secara berkelanjutan yang dilakukan melalui desa wisata dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah seharusnya dibangun berdasarkan peran aktif para *stakeholder* berdasarkan tugas dan wewenangnya.

Stakeholder yang terlibat dalam pengembangan desa wisata dapat berasal dari pemerintah desa setempat, kelompok pengelola pariwisata, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta masyarakat lokal desa (Brilianti, dkk. 2021: 1270). Secara singkat *stakeholder* menjelaskan bahwa dalam rangka mengembangkan desa wisata dapat berasal dari unsur pemerintah desa setempat,

pengusaha lokal, dan masyarakat lokal (Cahyana dan Nugroho, 2019: 392). Selanjutnya dalam penelitian lain menyatakan bahwa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan beserta masyarakat lokal juga termasuk dalam *stakeholder* yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan pengembangan desa wisata (Yunita, dkk. 2022: 319). Dari beberapa penelitian terkait peran *stakeholder* yang telah dilakukan dalam pengembangan desa wisata tersebut, maka penulis akan mengkaji pengembangan desa wisata dengan melihat peran *stakeholder* yang memiliki keterlibatan pada pengembangan Desa Wisata Sembungan, yaitu:

1. Pemerintah Desa Sembungan
2. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Cebong Sikunir
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
4. Masyarakat Desa Sembungan

Urgensi peningkatan peranan *stakeholder* dalam kontribusinya melakukan pengembangan pariwisata akan memberi pengaruh dalam jangka panjang baik dari segi sosial budaya, ekonomi, dan ekologisnya (Firdaus & Endah, 2016:3). Keikutsertaan peranan *stakeholders* dapat menciptakan rancangan strategi pariwisata yang mampu dipahami oleh tiap *stakeholder* yang terlibat, dapat meminimalisir konflik dalam implementasi kebijakan, dan dapat menyatukan persepsi tiap *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata (Wanner & Pröbstl-Haider, 2019:2). Berdasarkan berbagai alasan tersebut, peranan *stakeholder* menjadi esensial dalam kegiatan mengembangkan pariwisata. Selain peranannya dalam menghasilkan rancangan strategi pariwisata dengan banyak ketertarikan,

melalui peran *stakeholder* juga dapat mewujudkan sistem pengembangan pariwisata yang mangkus dan berkelanjutan melalui perwujudan desa wisata.

Dalam mendukung permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai sumber jurnal penelitian terdahulu terkait peran *stakeholders* dalam pengembangan potensi pariwisata pedesaan (desa wisata). Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga menjadikan naskah penelitian terdahulu sebagai saah satu pedoman dalam penelitian. Penelitian terdahulu dicantumkan pada tulisan ini untuk melihat perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya, menghindari plagiasi dan melihat temuan terbaru dalam penelitian.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, diperoleh identifikasi masalah pada tulisan ini, meliputi:

- a. Masih terdapat potensi daya tarik wisata Desa Sembungan yang belum dimanfaatkan sebagai wahana pariwisata oleh pihak pengelola Desa Wisata Sembungan seperti potensi Gunung Pakuwaja dan Bukit Seroja.
- b. Belum optimalnya proses koordinasi pengembangan Desa Wisata Sembungan antara pihak Desa Wisata Sembungan dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- c. Belum optimalnya peran dan partisipasi masyarakat dibuktikan dengan masih adanya masyarakat Desa Wisata Sembungan yang belum memberikan dukungan teradap pengembangan Desa Wisata Sembungan.
- d. Belum optimalnya membangun kemitraan dengan berbagai *stakeholder*.

1.3 Rumusan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana identifikasi *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo?
2. Bagaimana peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo?
3. Apa saja faktor penghambat atau pendukung peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, ditentukan tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis *stakeholder* yang memiliki peranan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo beserta bentuk peranan yang dilakukan masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo.
2. Melakukan analisis terhadap faktor penghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan kabupaten Wonosobo.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian yang membahas peran *stakeholders* pada sektor pariwisata, khususnya

pariwisata berbasis desa wisata. Kontribusi tersebut berupa adanya tambahan referensi mengenai dinamika peranan *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata.

b. Kegunaan Praktis

Hasil analisis dari penelitian ini harapannya dapat bermanfaat bagi *stakeholder* yang berperan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. Mengingat pentingnya peran *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata, harapannya penelitian ini mampu memberikan motivasi bagi desa wisata lain dan pemerintah daerah khususnya bagi Kabupaten Wonosobo dalam melakukan pengembangan desa wisata melalui peranan *stakeholder*. Melalui penelitian ini juga diharapkan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki bahan diskusi untuk membangun kerjasama terkait perkembangan desa wisata di Kabupaten Wonosobo.

1.6 Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terhadap suatu topik permasalahan dalam sebuah penelitian maka dibutuhkan suatu kerangka teori yang menjadi landasan dan pedoman yang digunakan dalam penelitian melalui kerangka teori. Teori adalah suatu rangkaian asumsi, konstruksi, konsep, dan definisi, serta suatu yang berhubungan untuk dapat mengkaji suatu fakta sosial melalui perumusan hubungan antar konsep yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(Handayani & Warsono, 2017)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengembangan objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang	<i>Stakeholders</i> dalam pengembangan objek wisata Karang Jahe yaitu <i>stakeholder</i> kunci dan <i>stakeholder</i> primer. Kemitraan dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah kemitraan mutualistik (<i>give and take</i>) yang saling menguntungkan. Faktor penghambat pengembangan pariwisata Karang Jahe adalah keterbatasan lahan, anggaran, sumber daya manusia, pola pikir, regulasi, promosi pariwisata, dan kerjasama antar <i>stakeholders</i> .
2.	(Destiana et al., 2020)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Terdapat 38 <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengembangan pariwisata yang membentuk jaringan <i>pentahelix</i> dan diklasifikasikan perannya sebagai <i>stakeholder</i> primer, sekunder dan kunci. Peran yang diambil oleh para <i>stakeholder</i> adalah koordinator, <i>policy creator</i> , fasilitator, akselerator, dan implementor. Faktor pendukung pengembangan pariwisata yaitu komunikasi. Faktor penghambatnya yaitu regulasi dan kepercayaan para <i>stakeholders</i> .
3.	(Budiani et al., 2018)	Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	Desa Wisata Sembungan memiliki berbagai potensi yang perlu dipetakan untuk inventarisasi dan dikelola

(1)	(2)	(3)	(4)
		Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah	lebih lanjut. Dalam penembangan pariwisata Desa Sembungan masih memiliki kendala yakni koordinasi dan kemitraan antar <i>stakeholder</i> .
4.	(Dewi Brilianti et al., 2021)	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan Desa Wisata Randugede Hidden Paradise, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan	Peran <i>stakeholders</i> yang terkoordinasi mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa wisata. Pengelompokan <i>stakeholder</i> meliputi <i>stakeholder</i> primer, kunci, dan sekunder. Peran <i>stakeholder</i> tersebut antara lain sebagai <i>policy creator</i> , koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.
5.	(Nur Chasanah, 2019)	Analisis Pengelolaan Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga	Tahapan tata kelola Desa Wisata Tingkir lor masih ditemui beberapa kendala dilihat berdasarkan teori fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Faktor pendukung pengembangan Desa wisata berasal dari potensi pariwisata desa. Faktor penghambatnya yaitu minimnya keterlibatan masyarakat, rendahnya sikap kerja sama, kualitas sumber daya manusia masih minim, dan komitmen pemerintah yang masih kurang.
6.	(Firdaus & Endah, 2016)	Accelerating the Development of Bangka Island through Sustainable Tourism by Strengthening the Roles of Multi- <i>stakeholder</i>	Penguatan peran pemangku kepentingan dalam pengembangan pengelolaan pariwisata menjadi penting untuk menunjang pariwisata berkelanjutan berhubungan dengan pembangunan jangka panjang.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	(Duarte Alonso & Nyanjom, 2017)	Local <i>stakeholders</i> , role and tourism development	Keterlibatan <i>stakeholder</i> yang berperan secara proaktif dalam keberlanjutan pariwisata daerah dapat menjadi wahana pariwisata yang efektif dalam meningkatkan citra destinasi wisata lokal.
8.	(Kappola et al., 2020)	The Roles and Contributions of <i>Stakeholders</i> in Villages Tourism Brand Management in Bali and India	<i>Stakeholders</i> memainkan peranan penting dalam hal <i>branding</i> desa wisata dalam meningkatkan ikon destinasi secara lebih maksimal sehingga kontribusi antar <i>stakeholders</i> perlu untuk dikembangkan.

Sumber: Diolah dari Beberapa Literatur, 2022

Penelitian yang dilakukan oleh (Handayani & Warsono, 2017) terkait peran *stakeholders* dalam mengembangkan pariwisata Karang Jahe, Rembang. Penelitian ini melakukan analisa peran masing-masing *stakeholder* dan melakukan pemetaan *stakeholder* berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya. Penelitian ini juga mengungkapkan hambatan yang dihadapi *stakeholders* dalam pengembangan potensi pariwisata. Penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* yang dikemukakan Maryono (2005) dan teori peran *stakeholder* oleh Nugroho (2014). Kesamaan penelitian dengan jurnal ini adalah kesamaan pada penggunaan teori dalam melakukan analisis peran *stakeholder* sehingga penelitian ini memberikan manfaat referensi terhadap penelitian. Perbedaan antara penelitian dengan jurnal ini adalah perbedaan lokus penelitian. Selain itu, pada penelitian ini tidak melakukan pembahasan mengenai pemetaan para *stakeholder*.

Penelitian selanjutnya oleh (Destiana et al., 2020) yang mengkaji keterlibatan *stakeholders* dalam mengembangkan destinasi Wisata Halal di Pulau

Penyengat, Riau beserta peran dan faktor penghambat pengembangan. Kesamaan jurnal dengan penelitian ini terletak pada ranah bahasan penelitian, yakni pembahasan terkait pengembangan pariwisata. Kesamaan lain terletak pada kesamaan penggunaan teori untuk melihat peran *stakeholders*, yakni teori oleh Nugroho (2014). Perbedaan jurnal dengan penelitian berada pada lokus penelitian dan perbedaan penggunaan model teori dimana pada jurnal tersebut menggunakan model *pentahelix* dalam melakukan identifikasi *stakeholder*.

Selaras dengan penelitian di atas, Brilianti et al.,2021 melakukan penelitian terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata pada desa wisata Randugede. Teori dalam tulisan ini menggunakan teori pengelompokan *stakeholder* (Maryono, 2005) dan teori peran *stakeholder* (Nugroho, 2014). Kesamaan jurnal dengan penelitian ini yaitu kesamaan teori dalam melihat peran *stakeholder* dan kesamaan pada lingkup penelitian yakni terkait Desa Wisata. Perbedaan anatar jurnal dan penelitian berada pada salah satu penggunaan teori dalam mengelompokkan *stakeholder* yang pada jurnal ini menggunakan teori pengelompokan *stakeholder* oleh Maryono (2005) dan pada lokus yang diterapkan oleh peneliti.

Berlanjut pada penelitian yang dilaksanakan di Desa Wisata Sembungan oleh (Budiani et al., 2018) tentang analissi potensi dan strategi pengembangan desa wisata. Dalam melihat pembangunan pariwisata di Desa Wisata Sembungan didasarkan pada indikator pembangunan pariwisata oleh UNWTO. Kesamaan jurnal dengan penelitian ini terletak pada lokus bahasannya yang terkait dengan Desa Sembungan. Perbedaan jurnal dengan penelitian adalah fokus penelitian,

jurnal ini berfokus strategi pengembangan pariwisata dilihat dari keadaan pariwisata di Desa Sembungan, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada peranan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. Manfaat jurnal terhadap penelitian ini yaitu dipahaminya gambaran kondisi pariwisata di Desa Wisata Sembungan.

(Chasanah dan Nurcahyanto, 2019) melakukan penelitian di Desa Wisata Tingkir Lor Kota Salatiga. Teori yang digunakan untuk melakukan analisis pengelolaan Desa Wisata, yakni menerapkan teori manajemen oleh George Terry dan Hasibuan. Persamaan jurnal dengan penelitian ini, yaitu kesamaan pada bahasan yang digunakan yaitu terkait desa wisata. Manfaat jurnal terhadap penelitian ini, yaitu kesamaan teori yang digunakan untuk melihat faktor penentu pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh Nyoman S. Pendit yang meliputi faktor masyarakat, faktor alam, faktor sejarah, dan faktor sumber daya manusia. Perbedaan jurnal dengan penelitian ini, yaitu perbedaan teori dan cakupan pembahasan yang digunakan dalam penelitian pada jurnal yang melakukan pembahasan terhadap manajemen pengelolaan desa wisata.

Penelitian selanjutnya dilakukan di Pulau Bangka oleh (Firdaus & Endah, 2016) tentang penguatan *multistakeholder* dalam percepatan pembangunan pariwisata. Penelitian ini menekankan peran *multi-stakeholder* yang mencakup pemerintah, swasta, masyarakat, dan institusi pendidikan. Dalam penelitian ini, peran aktor dianalisis menggunakan konsep tata kelola pariwisata. Hasilnya penekanan peran antar *stakeholder* dalam pendekatan pariwisata berkelanjutan mampu berkontribusi terhadap sektor pariwisata berkelanjutan yang berhubungan

dengan pembangunan jangka panjang. Perbedaan jurnal dengan penelitian terletak pada penggunaan teori dalam melihat *stakeholder* pada pengembangan pariwisata.

Penelitian lain dilakukan oleh (Duarte Alonso & Nyanjom, 2017) yang dilakukan di Bridgetown, Australia. Penelitian ini berlandaskan teori peran untuk menganalisis potensi pariwisata berkelanjutan yang tepat digunakan di masyarakat pedesaan. Hasilnya keterlibatan *stakeholder* yang berperan secara proaktif dalam keberlanjutan pariwisata daerah dapat menjadi wahana yang efektif untuk mengembangkan citra destinasi wisata lokal. Di sini penguatan peran masyarakat menjadi penting dalam mendukung kemajuan pariwisata pedesaan. Perbedaan antara jurnal dan penelitian adalah fokus yang dibahas dalam penelitian jurnal ini lebih menekankan peranan masyarakat yang dominan dalam mengembangkan pariwisata, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya difokuskan pada masyarakat saja.

(Kappola et al., 2020) melakukan penelitian terkait peran dan kontribusi *stakeholder* di wisata pedesaan antara Bali dan India yang berfokus pada manajemen *branding* pariwisata. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif yang berlandaskan teori *stakeholder* dalam merek pengelolaan pariwisata. Hasilnya para *stakeholder* memiliki peran yang penting dalam membangun *branding* desa wisata yang mampu mendorong peningkatan kunjungan wisata, meningkatkan impresi dan menjaga keberlanjutan desa wisata. Dalam mewujudkan hal tersebut, setiap *stakeholder* harus menciptakan citra merek desa wisata yang baik. Perbedaan jurnal dengan penelitian terletak pada teori yang digunakan dalam mengidentifikasi peran *stakeholder* dalam pengembangan

pariwisata. Pada jurnal ini digunakan teori *stakeholder* dalam merek pengelolaan pariwisata oleh Aaker (1991), sedangkan pada penelitian digunakan teori peran *stakeholder* oleh Nugroho (2014).

1.6.2 Administrasi Publik

Berdasarkan pendapat Chandler dan Plano Adimistrasi Publik dijelaskan sebagai serangkaian langkah dalam mengorganisir sumber daya publik dengan diberikan suatu koordinasi dalam rangka memformulasikan, melaksanakan dan melakukan pengelolaan terhadap berbagai yang termuat di dalam kebijakan publik (Keban, 2004:3). Pengertian Administrasi Publik juga merujuk pada suatu langkah yang menunjukkan metode yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai filial tunggal yang memiliki kekuasaan atau atau menjadi filial sebagai regulator, yang giat dan selalu memiliki prakarsa dalam menyusun atau mengambil serangkaian tindakan yang menjadi suatu hal yang esensial bagi mereka untuk diambil dan baik jika diterapkan kepada masyarakat sebab diproporsikan bahwa masyarakat menjadi pihak yang statis dan belum berkemampuan, yang diharuskan untuk patuh dan memperkenankan apapun yang menjadi kehendak pemerintah (Keban, 2004).

Administrasi publik terus mengalami perkembangan hingga ditafsirkan sebagai manajemen. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh L. F. Keller (dalam Keban, 2014:8) bahwa administrasi publik didefinisikan sebagai sistem manajemen untuk administrasi publik yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut administrasi publik didefinisikan sebagai manajemen dalam ekspansi teknologi modern yang mengarah pada modern *governance*. Pengertian

tersebut merupakan hasil reformasi administrasi publik yaitu *New Public Management* (NPM). Hasilnya baru-baru ini administrasi publik didefinisikan oleh C. T. Goodsell (dalam Keban, 2004:9) dipandang sebagai upaya yang dilakukan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang terintegrasi (*integrated public governance*) yang menunjukkan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterlibatan sebagai pelaksana pelayan publik terintegrasi didasarkan pada nilai keadilan, efisiensi, legalitas, keteladanan, transparansi, keteladanan, keterlibatan, dan integritas untuk menuju ketercapaian kehidupan demokratis serta terbangunnya masyarakat untuk menaruh rasa percaya pada organ publik.

Dalam penelitian ini, digunakan paradigma *governance* sebagai salah satu paradigma dalam disiplin administrasi publik. Paradigma *governance* muncul pada tahun 1990-an dan masih diterapkan hingga sekarang (Kurnia, 2010: 57). Perkembangan teori administrasi publik telah berimplikasi pada pelaksanaan peranan administrasi publik yang berkaitan dengan pendekatan yang diambil oleh pembuat dan pengimplementasi strategi, pengaturan organisasi internal dan terbangunnya korelasi antar badan publik bersama pelaku politik, masyarakat serta pihak-pihak lain. *Governance* menekankan aksi kolektif atau gerakan bersama yang mana tiap aktor akan saling memiliki hubungan dan timbal balik untuk mencapai kepentingan bersama.

1.6.3 Manajemen Publik

Manajemen menurut G.R.Terry (dalam Chasanah, 2019:30) merupakan sebuah tahapan atau proses kerja dengan mengikut sertakan pembimbingan dan arahan kepada kelompok tertentu menuju ketercapaian visi atau Haluan yang

bersifat konkret. Selanjutnya manajemen didefinisikan sebagai salah satu keilmuan yang berdaya secara terstruktur dalam mencari pengertian terkait alasan dan proses yang dilakukan manusia dalam kerja sama yang memberikan kebermanfaat sekaligus mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Luther Gullick dalam Handoko (2012:11)). Dari pengertian tersebut manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengaturan yang melibatkan sumber daya manusia dalam mewujudkan ketercapaian tujuan dalam organisasi.

Manajemen menjadi salah satu ruang lingkup dalam administrasi publik dengan istilah manajemen publik. berdasarkan pendapat Overman (dalam Pasolog, 2013:83), manajemen publik dapat dimaknai sebagai suatu studi antar bidang studi berdasarkan aspek umum organisasi, yang merupakan gugus antara fungsi manajemen dengan sumber daya manusia, pendanaan, informasi dan sistem politik. Antara kebijakan dan manajemen publik menjadi bidang yang saling saling bertumpang tindih. Untuk dapat memperjelas pembeda antara ke dua teori utama administrasi publik tersebut maka dianalogikan bahwa kebijakan publik sebagai sistem atara syaraf dengan otak. Sedangkan manajemen publik dianalogkan sebagai sistem peredaran darah pada organ yang dimiliki manusia. Secara lebih mudah mengandung artian bahwa manajemen publik sebagai tahapan pengaturan sumber daya suatu organisasi publik yang didasarkan atas arahan yang tertuang di dalam kebijakan publik.

Manajemen publik terus mengalami transformasi seiring dengan perkembangan dalam paradigma administrasi publik. Diawali dengan paradigma *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM) dan *New*

Public Service (NPS). Munculnya NPM adalah sebuah evolusi sekaligus menjawab berbagai kelemahan dari penerapan *old public administration* (LAN, 2015). Pengertian NPM secara umum adalah “*deliberate changes to the structures and processes of public sector organizations with the objective of getting them (in some sense) to run better*” (Wicaksono, 2019), yaitu mendelibrasikan perubahan dalam tatanan dan tahapan dalam organisasi publik yang bertujuan untuk mendapatkan suatu hal menuju perbaikan. Atas dasar itu, definisi-definisi terkait *public management* terus berkembang sejalan dengan perkembangan sebuah organisasi.

Sebagai salah satu fokus dalam administrasi publik, manajemen publik secara terperinci melakukan pengulasan terkait rancangan program dan perubahan struktur dalam suatu organisasi (Andy dan Oscar, 2017). Diungkapkan oleh Laurence Lynn terkait dengan probabilitas penggambaran manajemen publik (Andy dan Oscar, 2017:2), yaitu:

- (a) Manajemen publik sebagai seni, yaitu kegiatan inventif yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi tergantung pada kondisi dan litimasi yang berlaku.
- (b) Manajemen publik sebagai ilmu, yaitu suatu telaahan yang terstruktur dengan menerapkan suatu definisi yang diperlukan dalam manajemen publik.
- (c) Manajemen publik sebagai profesi, yaitu mengarah pada berbagai sumber daya manusia yang mengabdikan dirinya pada keilmuan manajemen.

Manajemen publik sebagai cabang ilmu administrasi publik juga mengaitkan kepada empat komponen penting dalam tata kelola pemerintahan yang dikemukakan oleh Houges (dalam Darniyus, 2021:34):

- (a) Manajemen: yaitu hasil dan tanggungjawab manajerial yang berfungsi sebagai tatanan lebih tinggi daripada administrasi (mengikuti intruksi).
- (b) Prinsip ekonomi: yaitu diambil dari teori *public choice*, teori *principal agent*, kontrak, persaingan, dan teori perusahaan dalam mengakomodasikan manajemen publik.
- (c) Teori dan praktik manajemen modern: yaitu fleksibilitas dalam kepegawaian dan organisasi.
- (d) Pemberian layanan penting bagi warga negara.

Beberapa pendapat di atas, maka mengkonseptualisasikan manajemen publik adalah sebuah ilmu yang kompleks, khususnya ketika ia telah berkembang melalui sistem administrasi publik (Dunleavy et al., 2016:469). Manajemen publik menjadi studi ilmu yang menjelaskan proses kerja sumber daya dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi yang telah dirumuskan.

1.6.4 Governance

Governance menjadi satu paradigma baru yang berada pada sektor tata kelola pemerintahan. *Governance* memiliki tiga pilaryang terdiri atas pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Paradigma ini sebagai pengembangan paradigma dari paradigma *government* (Santosa, 2008:67). Arah yang hendak dicapai dalam *governance*, yaitu untuk melakukan pengaturan dan pengarahan berbagai kegiatan msyarakat berlandaskan upaya yang dibangun oleh beberapa sistem dalam

mencapai setinggi-tingginya sesuatu yang menjadi kepentingan yang dimiliki publik. Pergeseran arah paradigma dari *government* menjadi *governance* dimana terjadi penekanan untuk melakukan kooperasi berlandaskan keseimbangan dan kesetaraan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sipil sehingga dikembangkan paradigma baru dalam administrasi publik yaitu pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam paradigma *governance* merujuk kepada personel non pemerintahan, swasta, serta personel publik. Pihak tersebut mempunyai komitmen dan persetujuan dalam melayani publik, dan pemerintah hanya bertugas dalam memberikan pelayanan (Farazmand, 2018: 319).

Paradigma *governance* dikenalkan sekitar tahun 1980-an yang rancangannya diprakarsai oleh beberapa negara barat yang bertujuan untuk meminimalisir peran-peran negara dalam pembangunan sekaligus melakukan pendelegasian peran negara tersebut kepada aktor lain selain yang berasal dari pemerintahan. Tindakan tersebut dilatar belakangi adanya kesadaran yang mulai tumbuh bahwa keterbatasan yang dimiliki pemerintah dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, teknologi dan terbatasnya kualitas manajemen yang dijalankan dalam menyelesaikan kemaslahatan publik. Selain karena kondisi tersebut, paradigma *governance* juga didukung dengan hadirnya era demokrasi memiliki keterbukaan dalam membagikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan pihak swasta dalam melibatkan dirinya pada pelaksanaan kebijakan (Agus dan Sulistyastuti, 2012:17).

Terdapat dua macam pandangan tentang paradigma *governance*, yaitu secara deskriptif dan perspektif (Arrozaq, 2016:16). Berdasarkan sudut pandang

deskriptif, paradigma *governance* hadir untuk mengatasi keterbatasan peran yang dimiliki pemerintah baik di negara maju maupun berkembang. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kemunculan ideologi neoliberal pada negara maju yang dahulunya menganut konsep *welfare state*. Konsep tersebut akhirnya menyebar menuju negara berkembang akibat pengaruh globalisasi. Terdapat himpitan dari pemerintah dalam mengaitkan pihak lain dalam menjalankan suatu program dan pengembangan. Melalui kehadiran berbagai aktor yang terlibat dalam program pembangunan negara dan dunia mengakibatkan banyak negara di dunia menjadi lebih plural. Pihak-pihak yang memiliki keterlibatan tersebut berusaha untuk mencukupi segala sesuatu yang telah diupayakan oleh pemerintah, bahkan terdapat pihak yang secara keseluruhan menggantikan peranan pemerintah dalam kegiatan pembangunan.

Pada paradigma *governance*, terdapat tiga aktor yang memiliki peranan dalam pembangunan, meliputi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah mulai melibatkan pihak di luar pemerintahan seperti pihak swasta dan masyarakat sipil dalam pencapaian tujuan pembangunan. Elemen yang dimiliki oleh ketiga aktor tersebut diperlukan dalam kegiatan saling melengkapi antar prakarsa yang dimiliki masing-masing aktor (Arrozaq, 2016:23).

1.6.5 Peran

Teori peran dijelaskan oleh Robert Linton (dalam Musadadd, 2018:28) menyatakan bahwa secara teori peran mengilustrasikan interaksi dalam lingkup sosial yang dapat didefinisikan sejumlah aktor yang berperan sesuai dengan napa yang telah ditetapkan dalam budaya. Berdasarkan teori tersebut menunjukkan

bahwa individu yang memiliki peran tertentu agar dapat menunjukkan perilaku sesuai peran yang dimiliki, yaitu sesuai hak dan kewajibannya.

Peran berkaitan dengan pekerjaan dan individu yang menjalankan seluruh kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai peranan yang dimilikinya (Wirutomo dalam Talib, 16). Selanjutnya menurut Thoha (2003:263) menjelaskan bahwa peranan diuraikan sebagai serangkaian tindakan teratur yang timbul akibat jabatan tertentu. Rafid (dalam Caahyana, 2019:392) mengidentifikasikan peran sebagai bentuk keterlibatan secara aktif oleh individu maupun kelompok sesuai kemampuannya tiap aktor yang memiliki keterlibatan secara aktif pada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Baik individu maupun kelompok tersebut bersama-sama dalam mewujudkan tujuan dengan kesadaran bahwa dirinya ikut terlibat dalam kegiatan dan memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut.

1.6.6 Stakeholder

Awal mula konsep *stakeholder* diwacanakan dalam Ilmu Administrasi adalah ketika pergeseran dari studi *government* ke *governance*. Pergeseran ini merupakan sebuah transformasi dalam tata kelola pemerintahan, sehingga negara bukan lagi menjadi aktor utama dalam pemerintahan (LAN, 2015:34). Oleh sebab itu, studi *governance* menempatkan aktor di luar pemerintah, seperti swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil dan sebagainya. Aktor-aktor di luar pemerintah ini disebut sebagai *stakeholder*.

Ada beberapa perbedaan antara konsep *government* dan *governance*. Diantaranya adalah dalam mengambil kebijakan, studi *government* masih mendudukan pemerintah menjadi aktor pusat. Sedangkan studi *governance*, dalam

pengambilan kebijakan lebih bersifat konsensus dari berbagai aktor dan pemerintah tidak lagi menjadi aktor pusat (Schwab dan Kubler dalam Kharisma, 2014:9). Perbedaan lain juga terletak dalam hubungan antara pemerintah dengan aktor lainnya. *Government* bersifat komando, sedangkan *governance* bersifat koordinatif (LAN, 2015:29).

Banyak literatur yang membahas mengenai *stakeholder*. Terdapat beberapa pengertian *stakeholder* yang penulis temukan, yaitu:

- a. *Stakeholder* adalah individu/kelompok yang memiliki hubungan tertentu dan memiliki aktivitas yang berhubungan dengan peran dan fungsinya (Freedman, dalam Okavia & Saharuddin, 2015:233).
- b. *Stakeholder* adalah warga negara/kelompok terorganisir/badan publik yang berpartisipasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang bersifat consensus (Ansell & Gash, 2008).
- c. *Stakeholder* adalah setiap aktor-aktor yang saling berhubungan dalam proses penciptaan nilai, norma dan etika yang berkembang secara efektif dan efisien di dalam struktur masyarakat (Freeman, et.al. 2020:221).

Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwa *stakeholder* adalah pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan didalam suatu kegiatan yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan tersebut.

Menurut Maryono (Latupapua, 2015:25-26) *stakeholder* dibagi kedalam tiga kelompok, antara lain:

1) *Stakeholder* Primer

Stakeholders primer dapat diartikan sebagai *stakeholder* yang menerima konsekuensi langsung yang bersifat positif ataupun negatif hasil sebuah kegiatan, dan berkaitan langsung dengan suatu kepentingan atau program. *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan kepentingan tersebut dapat dikatakan sebagai *stakeholder* primer, sehingga diupayakan secara keseluruhan pada kegiatan atau program.

2) *Stakeholder* Kunci

Stakeholder kunci diartikan sebagai pihak yang mempunyai legalitas yang kaitannya dengan pengambilan kebijakan atau keputusan.

3) *Stakeholder* Sekunder

Stakeholders sekunder (*stakeholder* pendukung) adalah *stakeholder* yang tidak mendapatkan dampak dan kepentingan secara langsung pada suatu kegiatan. Pihak yang menjadi *stakeholders* kunci mempunyai afeksi yang cukup besar pada serangkaian kegiatan yang sedang berjalan. *Stakeholders* sekunder dapat menjadi pihak yang memfasilitasi berbagai proses pembangunan pada satu kegiatan serta memiliki dampak pada pengambilan kebijakan.

1.6.7 Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholder* merupakan serangkaian tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh setiap pemangku kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. *Stakeholder* memiliki peranan berupa tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan perannya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nugroho (dalam

Handayani dan Warsono, 2017: 3), terdapat beberapa peranan *stakeholder* dalam kegiatan pembangunan, yang meliputi:

- 1) *Policy creator* didefinisikan sebagai *stakeholder* yang memiliki peranan pada setiap tahapan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam suatu program atau kegiatan.
- 2) Koordinator didefinisikan sebagai *stakeholder* yang memiliki peranan dalam melakukan koordinasi antar *stakeholder* yang memiliki keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan.
- 3) Fasilitator didefinisikan sebagai *stakeholder* memiliki peranan dalam memberikan segala bentuk fasilitas yang dapat memenuhi segala kebutuhan dalam suatu program atau kegiatan.
- 4) Implementator dapat didefinisikan sebagai *stakeholder* yang memiliki peranan dalam mengimplementasikan kebijakan yang di dalamnya termasuk kelompok sasaran.
- 5) Akselerator didefinisikan sebagai *stakeholder* yang memiliki peranan dalam percepatan dan menyalurkan suatu upaya dengan tujuan untuk memaksimalkan pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien berdasarkan waktu penyelesaiannya.

1.6.8 Pariwisata

16.8.1 Definisi Pariwisata

Pariwisata menurut Oka A.Yoeti (dalam Aliyah, dkk, 2020: 26) adalah perjalanan antar lokasi dalam waktu yang telah ditentukan dan bersifat sementara yang tujuannya bukan untuk memperoleh pendapatan di suatu tempat yang

dikunjungi, tetapi hanya sekedar menikmati perjalanan tamasya dan rekreasi atau untuk keinginan lainnya selain mencari pendapatan. Definisi pariwisata juga disampaikan oleh Koen Meyers dan WTO (*World Tourism Organization*) bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilaksanakan seseorang atau sekelompok orang dengan melakukan perpindahan tempat dan kegiatan sehari-harinya menuju hal baru dengan waktu yang terbatas, Tujuannya bukan untuk tinggal atau memperoleh pendapatn, namun hanya sekedar menjawab rasa keingintahuan, memanfaatkan waktu, maupun sekedar berlibur.

Kesimpulannya pariwisata merupakan perkumpulan kegiatan perjalanan perpindahan tempat dalam waktu yang telah ditentukan, bukan untuk tinggal menetap tetapi hanya sekedar memanfaatkan waktu luang, menemukan jawaban atas rasa keingintahuan, ataupun berlibur.

1.6.8.2 Pengembangan Pariwisata

Pariwisata sangat perlu untuk dikembangkan agar dapat terus bertahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan wilayah pariwisata. Pengembangan pariwisata adalah sebuah tahapan, kegiatan, atau upaya dalam mencapai keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam untuk dapat disuguhkan kepada individu maupun kelompok untuk waktu yang sementara yang tidak dapat diputuskan. Berdasarkan pendapat Clare A. Gunn (dalam Ismayanti, 2010:12) menyatakan bahwa suksesnya pengembangan wisata pada suatu wilayah akan bergantung pada kemampuan dalam merencanakan dan menyatukan berbagai komponen pariwisata secara beresinambungan ke dalam suatu perencanaan pembangunan pariwisata.

Pengembangan pariwisata berdasarkan pengaturan dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia diarahkan untuk:

1. Pemerataan pembangunan pada bidang kepariwisataan dan pembukaan peluang lapangan kerja dan usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pencapaian berbagai manfaat dalam lapisan kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, dan budaya dan terlestarikannya kualitas lingkungan hidup yang berada di kawasan pariwisata melalui perwujudan pengembangan pariwisata yang persisten.
3. Menambah tingkat kepuasan pengunjung pariwisata sekaligus dapat meluaskan pemasaran produk pariwisata daerah.
4. Mewujudkan suasana yang nyaman bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas KKN dalam pelaksanaan fungsi pelayanan untuk masyarakat yang menjadi suatu kepercayaan yang akan dipertanggung jawabkan (akuntabel).

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pariwisata dijelaskan bahwa tujuan dari pengembangan sektor pariwisata adalah:

1. Meningkatkan pendapatan devisa khususnya pendapatan bagi negara
2. Meningkatkan pertumbuhan di ekonomi masyarakat
3. Memperkenalkan dan memberdayagunakan keindahan alam dan kebudayaan indonesia.
4. Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional bahkan internasional.

Berdasarkan pendapat Cooper (dalam Wilopo & Halim, 2017:3) menyebutkan bahwa pengembangan pariwisata dapat dimaknai sebagai kegiatan peningkatan kemanfaatan sumber daya dalam suatu objek pariwisata. Pemanfaatan berbagai sumber dalam objek pariwisata harus berimbang berdasarkan komponen-komponen yang mendukung dalam pengembangan objek wisata, yaitu:

- a. Objek daya tarik wisata (*Attraction*), terdiri atas keunikan dan daya tarik berbasis alam, budaya, maupun buatan/artificial.
- b. Aksesibilitas (*Accessibility*), meliputi ketercapaian sarana dan sistem transportasi menuju daya tarik wisata.
- c. Amenitas (*Amenities*), meliputi fasilitas pendukung dan penunjang wisata.
- d. Fasilitas umum (*Ancillary Service*), meliputi segala macam bentuk pendukung objek wisata.
- e. Kelembagaan (*Institutions*), meliputi kelompok yang mempunyai legalitas dan fungsi dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata.

1.6.8.3 Faktor Penentu Pengembangan Pariwisata

Nyoman S. Pendit (dalam Chasanah, 2019: 54) mengemukakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. Faktor Masyarakat

Masyarakat utamanya masyarakat lokal merupakan pihak yang memiliki pengaruh terbesar dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya. Sehingga kehadiran masyarakat untuk beraspirasi

sangatlah penting dan perlu dikaitkan dalam mendukung pengembangan pariwisata. Dalam menciptakan hubungan mutualisme antara masyarakat terhadap pengembangan pariwisata lokal di daerahnya, maka sangat diperlukan saran dan masukan dari masyarakat.

b. Faktor Alam

Faktor alam yang dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan terhadap pengembangan pariwisata dapat dilihat berdasarkan keindahan dan keadaan iklim yang ada di suatu wilayah pariwisata. Keindahan alam dapat dilihat melalui bentangan topografi, keragaman hayati, kesediaan wahana dan daya tarik alam, dan lainnya. Sedangkan iklim akan mengacu pada keadaan kelembapan udara dan cuaca yang melingkupi suatu daerah.

c. Faktor Sejarah

Sejarah disini diartikan sebagai suatu peninggalan yang ada di suatu wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri dan menjadi daya tarik bagi pengunjung, sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penjagaan untuk meningkatkan nilai dan mempertahankan bentuk aslinya. Sejarah dapat berupa benda dan non benda, seperti bangunan, tempat ibadah, legenda, dan lainnya.

d. Faktor Keuangan

Keuangan menjadi salah satu faktor terpenting dalam pengembangan pariwisata mengingat pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keuangan dapat berasal dari internal maupun

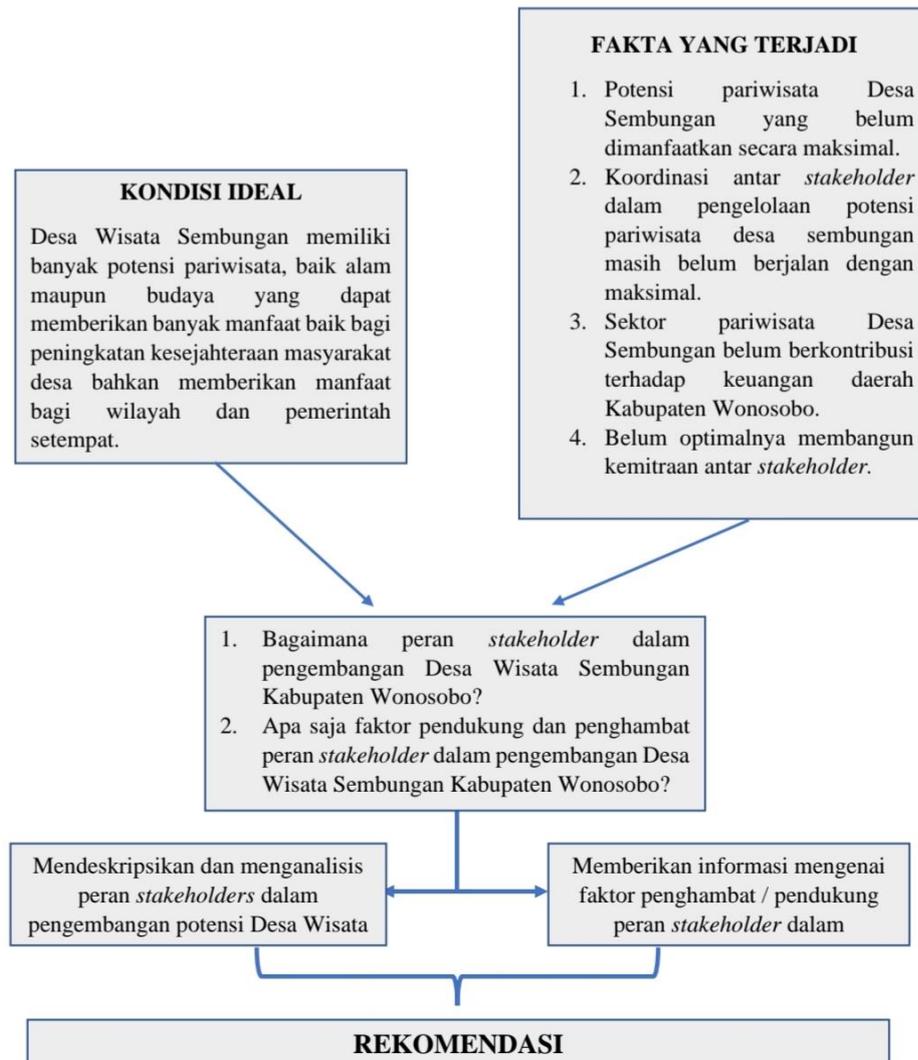
eksternal pengembang wisata. Untuk memaksimalkan pengembangan pariwisata dapat membutuhkan perananan infestor.

e. Faktor Sumber Daya Manusia

Ketersediaan perssonel pengelola pariwisata yang terlatih dan mempunyai kapasitas memadai sangat mempengaruhi dalam pengembangan dan perencanaan pariwisata. Dalam memaksimalkan pengembangan pariwisata akan membutuhkan personel pengelola pariwisata yang berkompetensi dalam bidang kepariwisataan.

1.6.9 Kerangka Pikir

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Diolah Peneliti, 2022

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan mengacu pada konsep peran *stakeholder*, yaitu tindakan atau aksi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam mewujudkan keberjalanan pengembangan potensi Desa Wisata Sembungan.

Tabel 1.8 Operasionalisasi Konsep Peran *Stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan

No.	Konsep	Definisi Operasional Konsep	Indikator
1.	<i>Policy Creator</i>	<i>Policy creator</i> adalah <i>stakeholder</i> dengan peranannya yang secara legal dalam membuat kebijakan terkait pengembangan Desa Wisata Sembungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi adanya kebijakan maupun keputusan berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Sembungan. b. Mengidentifikasi keterlibatan tiap <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kebijakan pengembangan Desa Wisata Sembungan. c. Mengidentifikasi proses pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.
2.	Koordinator	Koordinator adalah <i>stakeholder</i> yang berperan dalam mengkoordinasikan pihak yang mempunyai keterlibatan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi pihak yang berperan dalam melaksanakan koordinasi dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. b. Mengidentifikasi pembagian peran dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. c. Mengidentifikasi pelaksanaan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lain dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. d. Mengidentifikasi harmonisasi koordinasi oleh tiap <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. e. Mengidentifikasi intensitas komunikasi dalam pelaksanaan koordinasi pengembangan Dwsa Wisata Sembungan.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Fasilitator	Fasilitator adalah <i>stakeholder</i> memiliki peranan dalam memberikan segala bentuk fasilitas yang dapat memenuhi segala kebutuhan dalam suatu program atau kegiatan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang menjadi sumber penyedia sarana dan prasarana pendukung pengembangan Desa Wisata Sembungan. b. Mengidentifikasi sumber pendanaan dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. c. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang melakukan pembangunan infrastruktur penunjang pengembangan Desa Wisata Sembungan. d. Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang memberikan sosialisasi dan menyediakan informasi yang mendukung pengembangan Desa Wisata Sembungan.
4.	Implementator	Implementator adalah <i>stakeholder</i> yang melaksanakan berbagai keputusan dan wewenangnya dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi peranan yang dilakukan tiap <i>stakeholder</i> berdasarkan wewenang dan tugas yang dimiliki dalam mengembangkan Desa Wisata Sembungan. b. Mengidentifikasi komitmen yang dijalankan oleh masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. c. Mengidentifikasi bentuk peran yang dilakukan tiap <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.
5.	Akselerator	Akselerator adalah <i>stakeholder</i> yang berperan dalam melakukan percepatan pengembangan Desa	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi adanya strategi yang dilaksanakan <i>stakeholder</i> dalam percepatan pengembangan Desa Wisata Sembungan.

(1)	(2)	(3)	(4)
		Wisata Sembungan.	b. Mengidentifikasi adanya inovasi yang dikembangkan oleh tiap <i>stakeholder</i> dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu pengembangan pariwisata di Desa Wisata Sembungan, yaitu:

- a. Faktor Masyarakat, dapat ditentukan berdasarkan keaktifan dalam menyampaikan aspirasi pengembangan desa, penerimaan oleh masyarakat atas perubahan oleh pengembangan desa wisata, keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, dan dampak yang dirasa masyarakat terkait pengembangan desa wisata.
- b. Faktor Alam, dapat ditentukan berdasarkan potensi alam yang tersedia, keadaan alam yang menjadi daya tarik, dan keistimewaan letak wilayah/ciri khas geografis wilayah.
- c. Faktor sejarah, dapat ditentukan berdasarkan ketersediaan suatu peninggalan di Desa Wisata Sembungan yang menjadi ciri khas dan menarik minat pengunjung, sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penjagaan untuk menambah nilai dan mempertahankan keadaan aslinya.
- d. Faktor Keuangan, dapat ditentukan dengan kemampuan pendanaan pengembangan desa wisata, ketersediaan investor, dan ketersediaan *stakeholder* lain yang turut andil dalam pengembangan desa wisata.
- e. Faktor Sumberdaya Manusia, ditentukan oleh kemampuan sumberdaya pengelola dalam mengembangkan desa wisata, kompetensi sumber daya

personel yang melakukan pengelola desa wisata, dan inovasi yang telah dilakukan sumber daya pengelola dalam pengembangan desa wisata.

1.8 Argumentasi Penelitian

Tajuk penelitian bertopik “Peran *stakeholder* dalam Pengembangan Desa Wisata Sembungan Kabupaten Wonosobo” dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi secara lebih lanjut peranan *stakeholder* dalam mengembangkan Desa Wisata Sembungan, Kabupaten Wonosobo. Penelitian ini dilakukan mengingat Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah yang memiliki beragam potensi pariwisata, termasuk desa wisata sehingga penelitian ini akan memiliki kebermanfaatan dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Wonosobo dengan melihat peranan tiap *stakeholder* yang memiliki keterlibatan pada tahap pengembangan pariwisata.

Desa Wisata Sembungan telah menjadi salah satu desa wisata terbaik oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, namun masih memiliki permasalahan pada peranan pemangku kepentingan yang terlibat. Bahasan yang akan dijabarkan pada penelitian ini adalah peranan para pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata beserta serangkaian faktor yang pendukung/pnghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berguna bagi peneliti dalam melakukan penafsiran dan mendalami realitas kompleks terhadap kondisi tertentu dan implikasi terhadap satu permasalahan yang diangkat dalam

penelitian. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini mempunyai kekuatan untuk menghasilkan deskripsi tekstual yang lengkap tentang pengalaman orang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian (Mack, 2005: 22). Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode pendekatan penelitian yang diterapkan untuk meliti suatu objek secara alamiah berdasarkan data yang yang didapatkan melalui wawancara, studi literasi, dan lainnya (Bansal, 2013:1).

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan akan lebih tepat menggunakan penelitian kualitatif karena nantinya tiap informasi akan menginterpretasikan pengalaman masing-masing sesuai dengan perannya. Penggunaan pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti untuk menganalisis fenomena penelitian secara lebih mendalam terhadap substansi fenomena di lapangan.

1.9.2 Tipe Penelitian

Menurut Yin (dalam Saputra, 2019) menyatakan bahwa dilihat dari tujuannya, penelitian terbagi dalam tiga tipe yaitu eksploratori (penyelidikan), deskriptif (menggambarkan) dan eksplanatori (menjelaskan). Penelitian tipe deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dari suatu fenomena secara lengkap, tepat, dan menyeluruh. Jenis deskriptif adalah tipe penelitian yang menyajikan data secara lengkap mengenai fenomena atau kenyataan sosial. Penelitian deskriptif ini berusaha untuk menjawab secara lebih terperinci terhadap suatu fenomena melalui penjelasan yang lebih saksama. Dalam menjawab perumusan masalah pada penelitian ini dilaksanakan dengan menyajikan

penjelasan secara terperinci mengenai peranan *stakeholder* dalam mengembangkan potensi Desa Wisata Sembungan.

1.9.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah maupun tempat dilakukannya penelitian. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah peneliti susun. Lokasi penelitian yang diambil adalah Desa Sembungan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Desa Sembungan dipilih menjadi lokasi penelitian karena Desa Sembungan memiliki berbagai potensi pariwisata yang sebagian sudah dikenal oleh masyarakat luas seperti Bukit Sikunir dan Telaga Cebong. Desa Sembungan juga terletak di kawasan Dataran Tinggi Dieng yang termasuk dalam daya Tarik utama pariwisata di Kabupaten Wonosobo.

1.9.4 Subjek Penelitian

Subjek penelitian / informan kunci yang dipilih oleh penulis dalam mengungkapkan fenomena pengembangan Desa Wisata Sembungan berdasarkan peran para *stakeholder*, yaitu:

- a. Pemerintah Desa Sembungan
- b. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Sembungan
- c. Masyarakat Desa Sembungan
- d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo

Subjek penelitian berkaitan dengan individu maupun kelompok yang diharapkan oleh peneliti dapat menceritakan sesuatu yang diketahui mengenai topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penentuan subjek penelitian didasarkan

pada teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* yang juga dikenal sebagai pengambilan sampel secara selektif atau subjektif merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan penilaian tersendiri saat menetapkan anggota populasi yang memiliki keterlibatan dalam penelitian (Sauders, 2012: 63). Dalam *purposive sampling* ini subjek penelitian yang dipilih sangat jarang mewakili terhadap seluruh populasi karena tiap individu maupun kelompok dapat memberikan informasi yang unik berdasarkan pengetahuan masing-masing individu maupun kelompok.

Teknik *accidental sampling* akan digunakan untuk informan yang berasal dari masyarakat Desa Sembungan. Teknik *accidental sampling* / sampel insidental (Sugiyono, 2016:124) yaitu teknik pengambilan sampel yang diambil didasarkan pada kebetulan, yakni siapa saja masyarakat Desa Wisata Sembungan, Kabupaten Wonosobo yang ditemukan secara kebetulan oleh peneliti saat melakukan penelitian, dapat menjadi informan jika masyarakat tersebut memiliki kesesuaian menjadi informan.

1.9.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penile gunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data dengan bentuk ucapan, skema dan gambar (Sugiyono, 2016: 94). Pengumpulan data kualitatif tersebut dilakukan melalui studi literasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah jenis sumber data penelitian yang disampaikan oleh informan secara langsung, tanpa menggunakan perantara. Penggalian sumber data primer didapatkan peneliti lewat wawancara mendalam bersama informan yang berkaitan dengan pengembangan Desa Wisata Sembungan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis sumber data penelitian yang perolehannya bukan secara langsung, melainkan dengan media perantara yang didapatkan melalui pihak lain. Perolehan data dengan sumber data sekunder ini dapat berasal dari objek penelitian secara langsung. Data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan berbagai dokumen laporan historis maupun bukti catatanberkenaan dengan pengembangan Desa Wisata Sembungan baik berupa jurnal, laporan, buku maupun yang berasal dari media.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam pengumpulan data terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan meliputi:

(1) Wawancara Mendalam.

Wawancara mendalam merupakan suatu metode kualitatif yang paling umum. Salah satu alasan popularitasnya adalah bahwa teknik itu sangat efektif dalam memberikan gambaran mengenai manusia pada masalah penelitian. Wawancara mendalam menjadi suatu teknik untuk

menghasilkan deskripsi yang gamblang berdasarkan pandangan dari berbagai informan terkait lingkup penelitian (Mack et al., 2005).

Dalam praktiknya berupa mencatat, merekam dan menggali data primer. Proses wawancara ini dilakukan tidak hanya sekali dalam penelitian, tetapi sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkrit dan mendalam. Tipe pertanyaan yang diajukan dalam wawancara penelitian ini adalah *open-ended questions*, yaitu pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan mendalam.

(2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengacu pada dokumen maupun catatan terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, maupun karya historis seseorang. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Sembungan, seperti jumlah kunjungan wisatawan, data pendapatan desa dari sektor pariwisata, data sarana penunjang wisata desa, dan lainnya.

(3) Studi Literatur

Studi literatur yaitu kegiatan pengumpulan data melalui pengumpulan berbagai sumber pustaka untuk selanjutnya dapat dibaca dan dilakukan pencatatan hal-hal yang inti dalam sumber pustaka tersebut sebagai bahan data penelitian. dalam penelitian ini, studi literasi dilakukan

dengan mencari literasi karya ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian pengembangan desa wisata.

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui pengumpulan dari berbagai sumber lewat wawancara mendalam, materi secara visual dan audio, dan studi dokumentasi. Langkah yang dilakukan jika data telah berhasil dikumpulkan yaitu melakukan analisa data untuk dikelola menjadi suatu informasi yang berakhir pada penarikan kesimpulan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) kegiatan analisa data terdiri atas 3 komponen yang sekaligus digunakan dalam analisis dan interpretasi data terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan.

a. *Data Condensation*

Data Condensation merupakan kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi dan atau mengubah data yang muncul secara keseluruhan dalam catatan lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi, dan materi empiris lainnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan dengan memperoleh data yang tidak hanya didasarkan pada satu sumber tersebut, akan menguatkan hasil data yang ditemukan dalam tahapan penelitian. Tahapan yang dilakukan pada pengumpulan data untuk data kondensasi dilakukan melalui penulisan intisari pengkodean, ekspansi tema, pembuatan per bagian, dan mencatat rancangan analisis. Setelah penelitian berakhir, proses kondensasi data berlanjut hingga laporan akhir selesai. Kondensasi data menjadi bagian

dari proses analisis itu sendiri. Kondensasi data menjadi salah satu macam analisis pemilihan data berdasarkan kebutuhan dalam penelitian yang memudahkan dalam penarikan kesimpulan final.

b. *Data Display*

Tahapan analisis pada penelitian ini berlanjut pada kegiatan penyajian data untuk membantu peneliti dalam menyampaikan informasi, sehingga dapat diketahui tindakan yang perlu dilaksanakan saat terjadi sesuatu. Pada penelitian kualitatif, teks naratif menjadi satu contoh penyajian data yang memudahkan peneliti dalam mengambil kesimpulan. Penyajian data dalam bentuk tabulasi, diagram, matriks, maupun jejaring. Seluruh data disusun untuk memperoleh hasil informasi yang terstruktur dalam tampilan yang sederhana serta mudah dijangkau, sehingga peneliti mampu menyusun penyajian data secara lebih terstruktur.

c. *Drawing and Verifying Conclusion*

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi menjadi tahapan terakhir dalam analisis data kualitatif. Sejak pengumpulan data, peneliti mulai menginterpretasikan arti benda-benda, pola-pola, penjelasan, hubungan sebab akibat, dan proposisi. Penyajian kesimpulan pada tahap awal belum bersifat permanen jika belum ditemukan fakta pendukung. Jika data pendukung telah didapatkan sebagai suatu bukti kesimpulan, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai kesimpulan akhir. Tetapi jika dalam menyusun kesimpulan tersebut didukung oleh bukti yang

konsisten dan valid yang didapatkan oleh peneliti saat sedang melakukan penelitian kembali di lapangan. Kesimpulan tersebutlah yang dapat menjadi kesimpulan yang teruji. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi suatu temuan baru yang berbeda dengan penelitian yang terdahulu.

1.9.8 Kualitas Data

Dalam mengetahui kualitas data dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi adalah suatu kegiatan dalam penelitian yang dilakukan untuk memeriksa kebenaran data atau informasi yang didapatkan selama penelitian berdasarkan berbagai sudut pandang yang berlainan, melalui proses pengurangan bias yang muncul pada saat pengakumulasian dan analisis data. Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe triangulasi berikut.

a. Triangulasi Metode

Metode ini digunakan untuk menguji kualitas data yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan metode yang berbeda. Triangulasi metode dilaksanakan melalui tahapan perbandingan data atau informasi dengan metode variatif. Triangulasi metode diterapkan saat suatu data atau informasi yang diberikan oleh informan diragukan kebenarannya. Dalam penelitian ini, data dari hasil wawancara akan dibandingkan dengan hasil studi literasi dan dokumentasi. Jika data yang dihasilkan memiliki keragaman, maka peneliti akan melakukan pembahasan kembali bersama informan atau sumber data lain dalam memastikan kebenaran data., misalnya dengan

melakukan diskusi bersama informan yang berbeda terkait dengan peranan yang dilakukan dalam rangka pengembangan Desa Wisata Sembungan.

b. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data dilakukan melalui tahapan menemukan kebenaran informasi tertentu dengan beberapa metode dan sumber perolehan data dalam penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pembahasan mengenai peran *stakeholder* dalam pengembangan potensi Desa Wisata Sembungan, Kabupaten Wonosobo maka selain menggunakan wawancara dan dokumentasi akan dilakukan pengamatan terhadap keadaan antraksi wisata di Desa Sembungan dan melihat kontribusi *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Sembungan. Pada setiap cara pengambilan data akan menghasilkan data yang berbeda, yang selanjutnya yang menciptakan keluasan pengetahuan dalam mendapatkan kebenaran data tentang penelitian yang dilakukan. Nantinya hasil data dari metode pengambilan data tersebut akan dibandingkan satu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan data yang valid dan meminimalisir bias yang muncul dalam penelitian.